

## Development Strategy for Women's Empowerment in Supporting Small Businesses in Coastal Villages (Case Study: Negeri Lima, Leihitu District, Central Maluku Regency)

### Strategi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Kecil di Desa Pesisir (Studi Kasus : Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah)

**Finanda Amelia Wattimena<sup>1</sup>, Andiah Nurhaeny<sup>1</sup>, Wa Ode Sitti Jurianti Aswad<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura, Indonesia

\*Corresponding Author: [sittijurianti@gmail.com](mailto:sittijurianti@gmail.com)

**Abstract:** This research aims to determine the conditions and strategies for empowering women in supporting small businesses in Negeri Lima, Central Maluku Regency. This research uses a qualitative approach with data analysis through the stages of data collection, data reduction, data presentation and conclusions or verification. This research also uses SWOT analysis to formulate empowerment strategies. The data collection methods used were interviews, observation and documentation. The results of the research show that the condition of developing women's empowerment is first seen from the access indicator, which is divided into 2, namely production access is still limited by equipment because it is relatively simple, and there is no production house and lack of empowerment training in the economic sector. Access to distribution for this group is still within the village scope and cannot yet reach the general public because it is constrained by inadequate production equipment. Second, related to participation indicators, they are classified into 3 elements, namely Society Elements (women's groups), Government Elements (state) which are divided into State Government, BB3KP Satker, BPPP-Ambon, and the Central Maluku District Maritime and Fisheries Service and NGO/NGO Elements. Direct's benefits include increasing the number of customers and increasing revenue. Indirect benefits include increasing production capabilities, as well as opening up opportunities for this group as employment opportunities that can accommodate the needs of women who previously only played the role of housewives. Based on the results of the SWOT analysis, the strategy is more focused on expanding market reach by utilizing social media and exhibitions, increasing the quality and quantity of processed production to be more varied and encouraging village economic growth through small businesses..

**Keywords:** Women's Empowerment, Small Business, Participation.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan strategi pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di Negeri Lima, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pemberdayaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pengembangan pemberdayaan perempuan pertama dilihat dari indikator akses terbagi menjadi 2 yaitu akses produksi masih terkendala pada alat karena tergolong masih sederhana, dan belum adanya rumah produksi dan kurangnya pelatihan pemberdayaan di bidang ekonomi. Akses distribusi pada kelompok ini masih dalam lingkup desa dan belum bisa mencapai masyarakat umum karena terkendala pada alat produksi yang belum memadai. Kedua terkait Indikator partisipasi di klasifikasikan menjadi 3 unsur yakni Unsur Society (kelompok perempuan), Unsur Pemerintah (state) yang terbagi menjadi Pemerintah Negeri, satker BB3KP, BPPP-Ambon, dan Dinas Kelautan Perikanan Kab Maluku Tengah dan Unsur NGO/LSM. Manfaat Direct yang diperoleh meliputi peningkatan jumlah pelanggan dan peningkatan pendapatan. Manfaat indirect mencakup peningkatan kemampuan produksi, serta membuka peluang kelompok ini sebagai lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan yang sebelumnya hanya berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi lebih difokuskan untuk memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan media sosial dan pameran, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi olahan menjadi lebih variatif serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui usaha kecil.

**Keywords:** Pemberdayaan Perempuan, Usaha Kecil, Partisipasi

**History Article:** Submitted 5 May 2024 | Revised 06 June 2024 | Accepted 8 June 2024

**How to Cite:** (Wattimena et al., 2024). Wattimena, F. A., Nurhaeny, A., & Aswad, Jurianti, W. O. S. (2024). Strategi



© the Author(s) 2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Kecil di Desa Pesisir (Studi Kasus : Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(1), 26–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v12i1.20296>

## Pendahuluan

Pemberdayaan memiliki beberapa perspektif sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat, satu diantaranya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian (Aini et al., 2021). Pemberdayaan sendiri merupakan proses meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk membuat keputusan dan mengaktualisasikan keputusan tersebut menjadi tindakan dan hasil yang nyata (Rahman et al., 2023). Pemberdayaan perempuan penting untuk pembangunan masyarakat secara menyeluruh serta mempunyai nilai intrinsik serta instrumental (Mandal, 2013). Pemberdayaan perempuan pada sektor UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, memberikan peningkatan penghasilan, meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia serta menyiapkan komunitas perempuan menjadi komunitas yang ramah terhadap bank dan ekonomi (Marthalina, 2018). Menurut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kesenjangan perempuan apabila dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 55,44 persen sedangkan laki-laki mencapai 83,01 persen. Adapun penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan yaitu terbatasnya kesempatan perempuan terhadap akses pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan perempuan dibidang ketenagakerjaan masih tinggi (Dania 2019 dalam Aini et al., 2021)

Peremberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang (Suparjan & Suyatno, 2003). Permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan saat ini semakin kompleks dan saling berdampak antar sektor salah satunya adalah permasalahan perubahan iklim. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah di Indonesia yang paling rentan mengalami bencana akibat dari dampak perubahan iklim, salah satunya aspek kelautan dan perikanan (Bappeda Provinsi Maluku, 2011). Naiknya permukaan air laut juga mengancam potensi hasil perikanan dan kelautan yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi, sekitar 80 % masyarakat yang bermukim di pesisir, serta keberadaan 1.412 pulau dan daratan yang luasnya hanya 7,6 % dari total wilayah Provinsi ([www.harmonyalamindonesia.id](http://www.harmonyalamindonesia.id)). Pada Tahun 2019, Yayasan HAI secara aktif mulai terlibat dalam upaya perubahan iklim dan pemulihan ekosistem. Fokus utama yayasan ini adalah pada tiga desa pesisir di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah yaitu Desa Asilulu, Ureng, dan Negeri Lima. Melalui kolaborasi dengan Institut Tifa Damai Maluku (ITDM), HAI berusaha meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di setiap desa menunjukkan bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak yang signifikan, terutama terlihat dari penurunan hasil tangkapan ikan tuna akibat ketidakpastian musim.

Berdasarkan temuan tersebut, HAI dan ITDM merancang program pemberdayaan salah satunya di Negeri Lima, dengan tujuan meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim. Program ini mencakup berbagai strategi dan kegiatan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dengan fokus pada peningkatan adaptasi dan penanganan dampak ekonomi sosial yang terkait. Negeri Lima, salah satu desa di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, memiliki luas wilayah 11.700 km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 5.173 orang (BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2019). Di desa ini terdapat 19 ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok perempuan "Mahina Hena Lima". Kelompok ini dibentuk oleh Yayasan HAI dalam rangka meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan kegiatan kapital sektor kelautan perikanan. Pembentukan kelompok perempuan ini sebagai salah satu bagian dari komponen program pemberdayaan masyarakat pesisir, dimana kelompok tersebut dibentuk berdasarkan permasalahan perubahan iklim yang mengakibatkan ketersediaan hasil perikanan yang tidak menentu.

Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan suhu air laut dan kerusakan terumbu karang, berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja

sebagai nelayan di Negeri Lima. Nelayan, yang secara tradisional bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai satu-satunya sumber ekonomi, menghadapi tantangan saat musim buruk tidak memungkinkan melaut. Untuk mengatasi masalah ini, pemberdayaan kelompok perempuan menjadi solusi yang strategis. Menurut (Thaddeus et al., 2022) peran perempuan dalam dunia usaha saat ini semakin dikenal sebagai penggerak terkini pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta bintang baru di perekonomian negara berkembang. Kelompok perempuan di Negeri Lima membantu mengelola hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual sehingga menjadi alternatif penghasilan saat pasokan ikan menurun. Produk olahan kelompok ini adalah ikan asap cair yang merupakan produk unggulan desa Negeri Lima yang dipilih langsung oleh Pemerintah Negeri dan anggota kelompok perempuan untuk mendukung pengembangan usaha kecil yang dapat mengelola hasil perikanan menjadi produk yang memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat membantu menjalankan roda perekonomian desa.

Pemberdayaan kelompok perempuan sangat potensial untuk dikembangkan namun juga terdapat banyak tantangan yang harus diselesaikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Martalina (2019) yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)" menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam mendukung UMKM di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar namun harus dioptimalkan oleh pemerintah. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti swasta, perbankan dan lembaga lainnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Safrida et al., (2022) dengan judul "Peran *Stakeholder* sebagai Aktor Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan "Sepakat" melalui Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya" menunjukkan jika upaya pemberdayaan kelompok perempuan masih menemukan beberapa kendala seperti usaha yang bersifat musiman, belum ada pelatihan khusus dan pengayaan inovasi produk bagi kelompok, serta kurangnya kemampuan pengorganisasi usaha sehingga diperlukan kerjasama solid antar aktor kebijakan dalam menjalankan pemberdayaan dan lebih mengupayakan evaluasi pelaksanaan untuk menilai tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Desmawati (2021) yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Salma Batik di Dusun Malon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" menunjukkan potensi luasnya dukungan dari berbagai macam *stakeholder* dalam pemberdayaan usaha kelompok perempuan serta tanggapan positif dari masyarakat namun terdapat faktor penghambat seperti pemodal, rendahnya motivasi dan kurangnya pemasaran.

Pemberdayaan perempuan di Negeri Lima tidak hanya terkait dengan produktifitas masyarakat namun juga adaptasi ekonomi akibat perubahan iklim. Pemberdayaan perempuan ini menjadi solusi penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Hal ini membuat kelompok dapat berkontribusi signifikan dan dapat menghadapi tantangan marginalisasi dalam peran-peran seperti pekerjaan rumah tangga dan buruh tani di daerah pedesaan (Cai et al., 2019). Namun masih terdapat banyak permasalahan yang harus diatasi bersama antar *stakeholder* seperti minimnya modal usaha, sarana prasarana, pemahaman teknologi, izin/standarisasi dll. Apabila bisa dikembangkan dengan baik hasil tangkapan ikan akan menjadi produk olahan yang dapat bernilai tinggi dan menjadi produk unggulan desa. Selanjutnya produk ini dapat dipilih oleh Pemerintah Negeri dan anggota kelompok perempuan sebagai alternatif penghasilan saat pasokan ikan menurun. Inisiatif ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan ekonomi perempuan di desa tersebut, tetapi juga berpotensi dalam menjaga keberlanjutan perekonomian desa secara keseluruhan. Dari uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan strategi pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di Negeri Lima, Kabupaten Maluku Tengah.

## Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat atau kata-kata baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan (Suyanto dalam Purwaningsih & Kusuma, 2021). Pelaku yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 19 Anggota Kelompok perempuan Mahina Uli Nau Hena Helu, Anggota Yayasan HAI, Pemerintah Desa Negeri Lima, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, BPPP Ambon. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*.

Informan dalam penelitian ini adalah Sekertaris Pemerintah Negeri (Desa) Negeri Lima, Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah, Instruktur pelatihan BPPP Ambon, Koordinator program HAI, anggota/staff yayasan HAI, Kemitraan *Partnership* Program Adaptasi Perubahan Iklim, pihak masyarakat sipil yaitu ibu rumah tangga yang tergabung dalam anggota kelompok perempuan "Mahina Hena Lima" yang berjumlah 6 orang yang dianggap paling mengerti kondisi pengembangan pemberdayaan kelompok perempuan sehingga jumlah informan pada penelitian ini adalah 12 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Analisa data yang digunakan untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara serta observasi di lokasi penelitian secara deskriptif dengan melakukan reduksi data, penyajian data, serta membuat kesimpulan bagaimana peristiwa sebagaimana dalam rumusan masalah dalam penelitian ini dapat terjadi. Dan menggunakan analisis SWOT untuk menjawab strategi yang akan dirumuskan terhadap pengembangan pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di Desa Pesisir Negeri Lima. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data dengan melakukan triangulasi yaitu pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber yaitu mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Kecil di Negeri Lima

Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkipra dalam proses-proses perencanaan, penganggaran, pembangunan dan pengelolaan. Menurut Nugroho dalam (Kuntarta, 2020) ada empat indikator pemberdayaan dalam konteks kesetaraan gender yang dimulai dengan pemberdayaan bagi perempuan. Empat indikator tersebut meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat namun dalam penelitian ini digunakan 3 indikator yaitu indikator akses, partisipasi, dan manfaat.

#### Identifikasi Indikator Akses

Akses didefinisikan dalam menekankan bahwa relasi sosial yang luas akan lebih dapat membuka peluang bagi terciptanya jalur akses dan kesempatan baru untuk meraih manfaat dan keuntungan yang lebih banyak dari penggunaan sumberdaya (Ribot & Peluso, 2003). Menurut Ghimire et al., (2024) memprioritaskan akses perempuan terhadap sumber daya sangat penting untuk mendorong pemberdayaan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Akses dalam pemberdayaan perempuan pada usaha kecil hasil olahan ikan asap cair di Negeri Lima, terbagai menjadi dua akses yaitu akses produksi dan akses distribusi, adalah sebagai berikut:

##### a. Akses Produksi

Akses produksi dalam kelompok pemberdayaan perempuan Mahina Hena Lima merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh dan menggunakan sumberdaya, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan produksi kelompok, ini termasuk akses terhadap penyediaan modal usaha berupa bahan baku, peralatan produksi dan rumah produksi. Akses produksi sangat penting karena dapat memberikan kesempatan untuk kelompok pada pencapaian, hak pilihan dan sumber daya (Sahrakorpi & Bandi, 2021). Berikut merupakan kutipan wawancara narasumber terkait terkait akses produksi:

*"Untuk saat ini asap cair hanya ada di BPPP Ambon, karena alat yang digunakan dalam membuat Asap cair dimiliki oleh Balai sendiri sehingga dari alat tersebut kami berusaha menciptakan inovasi untuk pengembangan Asap cairnya" BP3-WRH39*

Akses produksi, bahan baku per produksi dalam pengolahan ikan asap cair di Negeri Lima sangat mudah diperoleh karena secara geografis Negeri Lima berada di dekat laut dan mayoritas pekerjaan masyarakat negeri lima adalah nelayan, serta sebagian anggota dari kelompok pemberdayaan perempuan ini adalah istri nelayan. Untuk bahan baku asap cair di beli dari BPPP-

Ambon dengan harga 1 botol Rp.70.000,- sumber modal usaha kelompok perempuan dalam bentuk barang (alat produksi).

### **b. Akses Distribusi**

Akses distribusi kelompok pemberdayaan perempuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelompok yaitu memperluas jangkauan bisnis, dan meningkatkan pendapatan. Hal ini juga membantu dalam memperluas kesempatan bagi kelompok yang sebelumnya mungkin terbatas dalam mengakses pasar atau saluran distribusi tertentu karena kendala geografis, infrastruktur yang kurang atau akses terbatas ke teknologi informasi. Akses Distribusi ikan asap cair pada kelompok perempuan ini masih di pasarkan dalam Negeri Lima saja, apabila ada konsumen yang datang memesan anggota kelompok akan memproduksi ikan asap cair dikarenakan ada hambatan pada modal usaha dan alat produksi yang masih sedikit dan tergolong sederhana. Kelompok perempuan mahina hena lima sudah tiga kali produksi ikan asap cair untuk pelanggan di dalam Negeri Lima.

*"Kami sebenarnya ingin memproduksi lebih banyak produk ikan asap cair tetapi kurang pada modal dalam membeli asap cairnya, dan kekurangan alat produksi sehingga sedikit ruang saja dalam proses pemanggangan ikan di oven, kalau untuk ikan sih bisa saja dengan mudah di dapatkan pada nelayan " SPem-KA60*

**Tabel 1.** Hasil Analisis terkait Indikator Akses

<b>Akses Produksi</b>	<b>Akses Distribusi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan baku utama ikan mudah didapat</li> <li>- Alat produksi masih tergolong sederhana, diperlukan bantuan oven listrik untuk memudahkan dalam mengolah ikan asap cair</li> <li>- Perlu adanya pelatihan pada manajemen keuangan pada kelompok sehingga dapat menghitung untuk jumlah pengeluaran pada produksi agar hasil penjualan tidak <i>mines</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatas di dalam lingkup desa Negeri Lima</li> <li>- Terkendala pada alat produksi yang tidak memadai untuk memproduksi lebih banyak hasil olahan agar bisa di distribusikan pada luar daerah</li> </ul>

### **Analisis Indikator Partisipasi**

Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan hal terpenting dalam pemberdayaan. Green & Brock (2005) mengemukakan secara sederhana bahwa partisipasi mengandung makna keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pencapaian partisipasi masyarakat pesisir di Negeri Lima keterlibatan kelompok perempuan dimulai dari tahap pembuatan keputusan dalam perencanaan, implementasi, pemanfaatan dan evaluasi, sehingga dapat menumbuhkan daya kreatif dalam diri kelompok perempuan, yang dapat mengembangkan kemampuannya untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program pemberdayaan. Pemberdayaan seperti ini menurut (Dabissa, 2013) dapat meningkatkan kapasitas untuk memberikan dampak institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berdasarkan hasil wawancara diketahui dalam pengembangan pemberdayaan kelompok perempuan pengelola hasil perikanan ikan asap cair di Desa Pesisir Negeri Lima melibatkan beberapa unsur *stakeholder* yaitu *Society* (Masyarakat yang terlibat dalam kelompok pemberdayaan perempuan), Pemerintah (*State*), dan LSM (Yayasan Harmony Alam Indonesia).

### **a. Society (Kelompok Perempuan)**

Kelompok perempuan di bentuk berdasarkan SK (Surat Keputusan) Kepala Pemerintah Negeri Negeri Lima Nomor: 140/14/SK/KPN-NL/1/2023 tentang pengukuhan kelompok perempuan pengelola hasil perikanan "Mahina Uli Nau Hena Helu" pada tanggal 19 januari 2023, dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 30 (tiga puluh) orang, tetapi seiring berjalannya kegiatan kelompok jumlah anggota kelompok berkurang menjadi 19 (sembilan belas) orang dikarenakan banyak dari mereka melanggar aturan dan kesepakatan kelompok yaitu tidak mengikuti kegiatan kelompok sebanyak tiga kali dan tidak mengumpulkan data administrasi berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) kepada ibu ketua kelompok dan

jumlah anggota 19 (Sembilan belas) orang ini sudah diinput oleh HAI, dan nama dari kelompok perempuan ini juga diganti menjadi Kelompok perempuan Mahina Hena Lima. Berikut merupakan hasil wawancara dari anggota kelompok:

*"Kalau di Surat Keputusan dari Pemerintah Negeri Negeri Lima, jumlah anggota yang dilantik sebanyak 30 orang. Tapi sekarang hanya 19 orang anggota yang tetap aktif dalam kegiatan kelompok pemberdayaan perempuan. Hal ini dikarenakan data administrasi mereka sudah lengkap, termasuk peran masing-masing anggota, dan telah diinput oleh tim HAI." SK-SM38*



**Gambar 1.** Aktifitas Usaha Pengolahan Ikan Asap Cair oleh Kelompok Perempuan Mahina Uli Nau Hena di Negeri Lima

#### **b. Pemerintah**

Unsur pemerintah yang ikut berpartisipasi dalam kelompok pemberdayaan perempuan Mahina Hena Lima berdasarkan hasil wawancara adalah Pemerintah Negeri Negeri Lima, BPPP-Ambon (Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan)-Ambon, Satker BB3KP (Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan).

#### **Pemerintah Negeri**

Pemerintah Negeri/Desa memiliki peran yang penting sebagai pemerintah tertinggi dalam lingkup desa, dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat khususnya pada kelompok perempuan di Negeri Lima, Pemerintah Negeri memfasilitasi partisipasi aktif kelompok perempuan dalam program pemberdayaan. Pemerintah Negeri harus memastikan bahwa anggota kelompok terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka. Sehingga, Pemerintah Negeri berantusias menjalin kerjasama dengan Yayasan HAI yang dapat membantu dalam mendapatkan sumberdaya tambahan, pengetahuan, dan dukungan teknis untuk mendukung program pemberdayaan. Dengan mengeluarkan SK pengukuhan kelompok, menyediakan tempat pelatihan disverifikasi produk olahan perikanan ikan asap cair di kantor Desa, dan mendukung untuk memasukan program pemberdayaan kelompok perempuan ke dalam BUMNeg yang menjadi produk unggulan di Negeri Negeri Lima.

*"Kerjasama dengan HAI memberikan dukungan finansial dan sumberdaya tambahan berupa SDM dari stakeholder untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan kelompok perempuan. Kerjasama ini membantu pemerintah Negeri Lima dalam menjalin kemitraan dengan organisasi lain pemerintah daerah, dan balai kementrian. Untuk memperlancar kepengurusan kelompok ini, Pemerintah Negeri Negeri Lima mengeluarkan SK legalitas kelompok yang Pemerintah Negeri berperan sebagai pengurus pelindung" PEMNEG-IS54*

#### **Satker BB3KP (Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan)**

Untuk membangun kerjasama dan dukungan *stakeholder* dilakukan diskusi dan konsultasi dengan Satker BBP3KP (Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan) – Ambon unit satuan kerja di bawah Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan - KKP yang salah satu fokus kegiatannya adalah melakukan pelatihan diversifikasi olahan produk perikanan bagi kelompok, selain pihak Satker BBP3KP – Ambon, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP – Ambon) juga memberikan respon baik atas kegiatan pemberdayaan kelompok

perempuan yang dilakukan HAI dan menyatakan kesediaannya untuk ikut melakukan pelatihan salah satu produk perikanan, yaitu olahan Ikan asap cair di Negeri Lima. Berikut ini merupakan kutipan wawancara narasumber terkait :

*"karena di daerah pesisir jazirah leihitu ini belum ada olahan-olahan dari ikan yang unik dan menarik yang mampu membawa perekonomian desa ke luar Kota, dengan ini HAI hadir sebagai penghubung dan fasilitator antara kelompok perempuan ini dengan stakeholder seperti dari BBP3KP – Ambon, BPPP-Ambon dan Dinas Kelautan Perikanan Maluku Tengah" KP.HAI-IP36*

Industri rumah tangga di sektor pangan harus memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT adalah sertifikat perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha rumahan atau industri kecil di bidang pangan di Indonesia. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Kelompok perempuan Mahina Henalima ini sudah di lengkapi dengan surat izin PIRT (yang di fasilitasi oleh BB3KP).

### **BPPP (Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan)-Ambon**

Menindaklanjuti kebutuhan peningkatan kapasitas kelompok terkait pelatihan olahan produk perikanan bagi Kelompok Perempuan Mahina Hena Lima dampingan HAI yang sudah disepakati bersama Satker BBP3KP – Ambon dan BPPP – Ambon adalah tenaga pelatih dari Satker BBP3KP dan BPPP bersedia datang ke kelompok untuk melakukan pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan dan demo olahan produk. Berikut ini adalah hasil wawancara dari instruktur pelatihan BPPP-Ambon terkait dengan dukungan bimbingan pengolahan ikan asap cair kepada kelompok perempuan Mahina Hena Lima:

*"HAI bekerjasama dengan BPPP Ambon sebagai Stakeholder pembimbing kelompok pemberdayaan perempuan di Negeri Lima. BPPP memberikan Training kepada kelompok perempuan Negeri Lima untuk membuat produk olahan Ikan Asap Cair yang nantinya akan menjadi usaha." BP3-WRH39*

Selain program pelatihan dalam membuat variasi produk perikanan, ada juga rencana untuk menyiapkan persyaratan administratif kelompok, termasuk mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai persyaratan untuk memperoleh Kartu KUSUKA. Dalam rangka memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan pendataan terhadap pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

*"Iya kami anggota kelompok sudah mengumpulkan KTP dan KK di ibu ketua fasilitator kelompok perempuan ibu onco, untuk membuat kartu KUSUKA, tetapi kartunya belum ada masih dalam proses pembuatan" SK-SM38*

### **Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah**

Dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir terkhusus pada kelompok perempuan Mahina Hena Lima, Yayasan HAI telah berinteraksi dengan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah dalam kegiatan BPPP-Ambon yaitu Pelatihan Budidaya Ikan Pada Karamba Jaring Apung (KJA) Bagi Pokdakan Negeri Lima, Ureng dan Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Yayasan HAI meminta dukungan dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah untuk mendaftarkan nama-nama kelompok pemberdayaan perempuan pengelola hasil perikanan ikan asap cair dari Negeri Lima pada program kerja POKLAHSAR UMKM Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.

*"HAI berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pembahasan kewenangan terkait masyarakat nelayan, pengelola hasil perikanan, dan pembudidaya. Meskipun kerjasama ini tidak bersifat langsung, saat ada kegiatan, HAI mengundang Dinas Kelautan dan Perikanan*

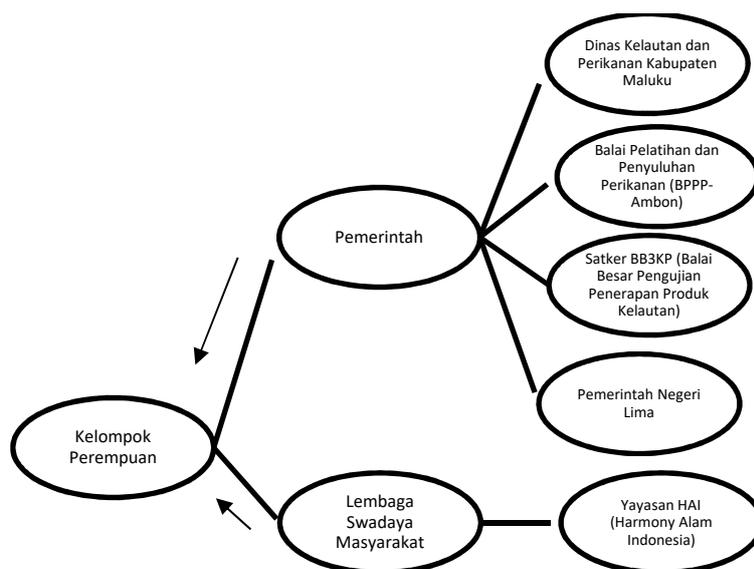
*sebagai narasumber untuk memperkuat sinergi antara NGO dan pemerintah daerah.”  
DKPMALTENG-RYW48*

### c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Melalui skema pendanaan dari *Adapation Fund* (AF) dan di dukung oleh Kemitraan – *Partnership for Governance Reform*, Yayasan Harmony Alam Indonesia (HAI) adalah LSM yang meluncurkan program tiga tahun berjudul “Memperkuat Kemampuan Adaptasi Komunitas Pesisir Dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim di Negeri Negeri Lima, Negeri Asilulu dan Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu komponen program dari HAI yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui Pengembangan ekonomi alternatif di wilayah pesisir yang tahan terhadap iklim dengan memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah pesisir, yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat pesisir HAI yaitu untuk meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian keluarga. HAI selaku LSM berperan sebagai penghubung antara kelompok pemberdayaan perempuan dengan pihak terkait yang mendukung untuk meningkatkan keterampilan anggota kelompok mahina hena lima dalam mengolah hasil perikanan berupa produk ikan asap cair.

*“Dengan membentuk kelompok perempuan, mereka dapat membantu meningkatkan perekonomian nelayan dengan mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah. Produk ini dapat menjadi sumber pendapatan ketika nelayan tidak dapat melaut dan mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan ikan.”MP.HAI-ASA53*

*“Semua sumber modal atau pendanaan bagi program pemberdayaan ini berasal dari kemitraan (Partnership for Governance Reform) yang di hibahkan ke HAI” SHAI-YZ43*



**Gambar 3.** Unsur *stakeholder* yang Berperan dalam Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Kecil di Negeri Lima

Hasil analisis partisipasi pada kelompok menunjukkan bahwa para perempuan yang terlibat dalam kelompok ini yang awalnya berperan pasif menjadi lebih aktif dan turut serta mengambil peran untuk meningkatkan perempuan dalam perekonomian keluarga. Kelompok perempuan ini mampu mencari solusi dengan mengusulkan adanya kerjasama dengan unsur swasta (*private sector*) guna menyelesaikan permasalahan pembiayaan produksi terkait kendala yang terjadi seperti beberapa anggota kelompok yang tempat tinggalnya jauh dari sentra produksi. Kebutuhan akan rumah produksi yang penting bagi jalannya industry ini membutuhkan biaya yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh kelompok maupun HAI sebagai koordinator program. Perempuan dalam kelompok secara mandiri menyelesaikan masalah tersebut dengan usulan kerja sama, namun tetap berkordinasi dengan pihak HAI agar produksi tetap berlangsung.

### **Identifikasi Indikator Manfaat**

Manfaat yang diperoleh dari pemberdayaan membawa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang terlibat aktif dalam kelompok pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sesuatu yang berkemampuan memberikan kekuasaan agar setiap individu atau kelompok orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan (Muhammad, 2009 dalam Mahmudah & Yasin, 2022). Manfaat pada penelitian ini di bagi menjadi 2 yaitu manfaat *direct* dan *indirect*. Indikator manfaat dalam konteks kelompok pemberdayaan terlihat bahwa terdapat manfaat langsung (*direct*) yang diperoleh meliputi peningkatan jumlah pelanggan dan peningkatan pendapatan walaupun belum dirasakan dampaknya secara langsung kepada anggota kelompok tetapi sudah menghasilkan pendapatan pada kas kelompok. Sementara itu, manfaat tidak langsung (*indirect*) mencakup pertumbuhan internal anggota kelompok yang berperan dalam peningkatan kemampuan produksi, serta membuka peluang kelompok ini sebagai lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan yang sebelumnya hanya berperan sebagai ibu rumah tangga.

### **Strategi pengembangan pemberdayaan kelompok perempuan agar bisa berkelanjutan terhadap pengembangan usaha kecil.**

#### **Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*)**

Analisis SWOT ini ditujukan untuk menemukan faktor eksternal dan faktor internal dalam penyusunan rencana pengembangan kelompok pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di Negeri Lima. Analisis SWOT sebagai berikut:

- A. Faktor internal yang di analisis adalah kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang terdapat dalam pengembangan kelompok pemberdayaan perempuan di Negeri Lima.
  - a) Kekuatan (*strength*)
    - Produk ikan asap cair merupakan produk olahan hasil perikanan awal kelompok yang akan dikembangkan dalam mendukung usaha kecil di Negeri Lima, dilihat dari akses produksi bahan baku utama ikan yang mudah didapat
    - Anggota kelompok perempuan sudah berdaya dalam mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji
    - Anggota kelompok perempuan dapat menambah ilmu dan meningkatkan keterampilannya dalam mengikuti pelatihan disverifikasi produk olahan ikan asap cair dari *stakeholder* pembimbing sebagai instruktur pelatihan
    - Pemerintah Negeri mendukung dengan mengeluarkan SK pengesahan kelompok perempuan
    - Pemerintah Negeri mendukung untuk memasukkan kelompok perempuan kedalam BUMNeg
    - Anggota kelompok perempuan sudah mendapat SPP-IRT
  - b) Kelemahan (*weakness*)
    - Dana yang terbatas mengakibatkan produksi menjadi tidak lancar
    - Kurangnya sarana prasarana dalam menjalankan produksi
    - Minimnya pemahaman akan teknologi membatasi pemasaran produksi
    - Belum adanya Izin usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
    - Belum adanya izin/standarisasi BPOM
- B. Faktor eksternal yang di analisis adalah peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*threats*)
  - a) Peluang (*Opportunities*)
    - Kemajuan teknologi dapat membantu kelompok memasarkan dan mengenalkan produk ke masyarakat luar
    - Membuka peluang kerjasama antara kelompok dengan pihak swasta seperti Bank
    - Pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan produk olahan
    - Mempromosikan ikan asap cair sebagai produk unggulan negeri lima oleh anak KKN
    - Memberi masukan ke Dalam program Dinas DPMNPA Maluku Tengah
    - Pengembangan UMKM menjadi salah satu program unggulan RPJM Provinsi Maluku Berdasarkan hasil wawancara anggota kelompok perempuan bahwa peluang dalam mengembangkan usaha kecil ikan asap cair ini adalah dengan adanya penambahan



menjadi salah satu program unggulan RPJM Provinsi Maluku		pada BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar produkolahan
<p><i>THREAT</i>(ANCAMAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya permintaan produksi</li> <li>- Beberapa UKM juga menjual hasil olahan</li> <li>- Lokasi produksi jauh dari pusat perekonomian</li> </ul>	<p>ST-STRATEGY (STRATEGI KEKUATANDAN ANCAMAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi olahan menjadi lebih bagus</li> <li>- Dipasarkan/dipromosikan ke Supermarket/Minimarket di pusat perindustrian</li> <li>- Mendaftarkan produk olahan ke Hak Kekayaan Intelektual HKI Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)</li> </ul>	<p>WT-STRATEGI (STRATEGI KELEMAHAN DAN ANCAMAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka toko offline sekaligus gudang di pusat Industry</li> <li>- Menjalin kerjasama dengan komunitas lokal Rabu-rabu market (RRM)</li> <li>- Pendaftaran IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)</li> </ul>

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, maka didapatkan 4 (empat) tipe strategi pengembangan UKM yang terdiri atas :

1. SO-Strategy (Strategi Kekuatan dan Peluang)

Strategi SO merupakan strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Strategi tersebut dapat dipakai dan diharapkan usaha kecil di Negeri Lima dapat menjalankan ekspansi pasar, meningkatkan produksi, dan mengupayakan kemajuan teknologi secara maksimal. Strategi SO yang tertuang dalam tabel matriks SWOT, menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil di Negeri Lima yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendorong kelompok agar mengikuti pameran UMKM yang diselenggarakan di Pusat Industry
- 2) Pemasaran, pengenalan, dan penjualan produk dapat dilakukan kelompok menggunakan *social media*
- 3) Bekerja sama dengan Pemerintah Negeri dalam menjual produk olahan ikan asap cair di *event* Pemerintah Negeri
- 4) Pemerintah Negeri mempunyai kebijakan terhadap pengembangan UMKM

Dengan strategi ini, diharapkan kelompok dapat mengoptimalkan peluang yang tersedia dalam event pameran, memperluas jangkauan pasar melalui media sosial, menjalin kerjasama yang kuat dengan Pemerintah Negeri, serta memanfaatkan kebijakan pengembangan UMKM yang ada untuk pertumbuhan dan peningkatan bisnis yang berkelanjutan.

2. ST-Strategi (Strategi Kekuatan dan Ancaman)

Strategi ST merupakan strategi yang ditetapkan atas dasar kekuatan yang dimiliki kelompok Mahina Hena Lima dalam mengatasi ancaman. Strategi ST yang tertuang dalam tabel matriks SWOT, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi yang dapat dilakukan kelompok Mahina Hena Lima untuk mengembangkan usaha kecil di Negeri Lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi olahan menjadi lebih bagus  
Pengembangan jenis produksi olahan menjadi lebih variatif, membuat varian rasa dari produk olahan ikan asap menjadi rasa original, pedas.
- 2) Dipasarkan atau dipromosikan ke Supermarket atau Minimarket di pusat perindustrian
- 3) Mendaftarkan produk olahan ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh (DJKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

3. WO-Strategi (Strategi Kelemahan dan Peluang)

Strategi WO merupakan strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan dalam kelompok Mahina Hena Lima. Strategi WO yang tertuang dalam tabel matriks SWOT, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil di Negeri Lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Kerjasama antar kelompok dan pihak swasta sebagai investor dan penyedia sarana prasarana
- 2) Menjaln kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Tengah

- 3) Mendaftarkan produk olahan pada BPOM untuk mendapatkan nomor izin edar produk olahan

Dalam pengembangan strategi ini, diperlukan dukungan dan kerjasama dengan beberapa pihak terkait baik dari swasta seperti investor maupun pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maluku Tengah dan Badan POM. Dukungan dari kedua pihak tersebut diperlukan untuk meningkatkan promosi olahan produk perikanan, meningkatkan skala usaha yang dapat dikembangkan untuk menangkap peluang pasar yang masih terbuka, serta pembinaan terhadap UKM yang masih dalam tahap rintisan dan masih belum berkembang.

#### 4. WT-Strategi (Strategi Kelemahan dan Ancaman)

Strategi WT merupakan strategi yang ditetapkan dalam kegiatan yang bersifat bertahan (*defense*) dan berupaya dalam meminimalkan kelemahan kelompok Mahina Hena Lima serta menghindari ancaman yang ada. Strategi WT yang tertuang dalam tabel matriks SWOT, menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil di Negeri Lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Membuka toko *offline* sekaligus gudang di pusat industri
- 2) Menjalin kerjasama dengan komunitas lokal
- 3) Pendaftaran IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)

Strategi ini menekankan pentingnya manajemen logistik yang efisien melalui toko dan gudang di pusat industri serta kemitraan strategis dengan komunitas lokal untuk meningkatkan visibilitas, akses, dan kesadaran akan produk ikan asap cair kelompok perempuan Mahina Henalima dan Pentingnya IUMK pada kelompok usaha. Hal ini diharapkan akan membawa pertumbuhan dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk mereka.

### **Strategi Pengembangan Usaha Kecil Berbasis Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan perekonomian Desa**

Dalam upaya meratakan pengembangan ekonomi desa dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan di Desa Negeri Lima, keterkaitan antara program pembangunan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dengan hasil analisis SWOT dijalankan untuk mencapai tujuan ekonomi desa yang berkelanjutan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, strategi kebijakan dan program ekonomi pedesaan untuk kelompok pemberdayaan perempuan di Negeri Lima telah diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi, produksi dan distribusi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar desa yang saling melengkapi dan saling menunjang. Aksesibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan kemudahan dalam pergerakan barang yang ditentukan berdasarkan kondisi infrastruktur transportasi seperti kondisi infrastruktur jalan raya yang baik, serta jalur transportasi umum dan konektivitas transportasi yang memadai.
- b. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha kelompok perempuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dalam sistem perekonomian desa.
- c. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menarik investasi dan meningkatkan kegiatan produksi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan lokasi geografisnya.
- d. Memperluas dan memperkuat jalinan kerja sama dengan berbagai macam *stakeholder* seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan LSM untuk memperoleh akses produksi dan distribusi.

Dalam penelitian ini menunjukkan masih banyaknya hal yang perlu didorong dalam pemberdayaan perempuan dalam usaha di Negeri Lima terutama terkait modal, sarana prasarana, teknologi, perizinan, inovasi, daya saing dll. Hal tersebut menambah temuan unsur-unsur penting yang menghambat pengembangan pemberdayaan perempuan dalam mengelola potensi lokal selain penelitian yang dilakukan oleh Safrida et al., (2022) yaitu terkait perlunya pelatihan khusus dan kurangnya pengayaan inovasi produk dan pengorganisasi usaha serta kerjasama solid antar aktor kebijakan dalam menjalankan pemberdayaan. Namun disisi lain usaha perempuan di Negeri Lima mendapatkan dukungan besar dan respon positif hal ini tentunya sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryani & Desmawati (2021) yang menunjukkan potensi luasnya dukungan dari berbagai macam *stakeholder* dalam pemberdayaan usaha

kelompok perempuan serta tanggapan positif dari masyarakat.

Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi akan sangat berdampak pada peningkatan ekonomi desa. Hal tersebut jika didorong oleh potensi sumber daya alam yang dekat dengan kelompok produksi, sumber daya manusia yang dikembangkan dan diberdayakan serta lokasi geografis yang mendukung kelompok dapat menarik investor dari luar.

Pemerintah Negeri Lima dapat berperan dalam meningkatkan daya tarik investasi dan menggalakan kegiatan produksi dengan memanfaatkan keunggulan kompartif dan kompetitif berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia khususnya kelompok perempuan serta lokasi geografis. Terkait dengan pemberdayaan perempuan dalam usaha, hal yang perlu dilakukan menurut Elizabeth (2016) adalah penciptaan iklim yang kondusif yang dapat dilakukan dengan a). Mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki; b). Menciptakan aksesibilitas terhadap berbagai peluang yang menjadikannya semakin berdaya; dan c). Tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan untuk mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi.

Selain itu, salah satu cara terpenting untuk melakukan pemberdayaan perempuan adalah dengan memungkinkan mereka, tanpa diskriminasi untuk memiliki akses dan pengaruh terhadap sumber daya yang berharga seperti tanah, uang, teknologi keuangan, pemasaran, komunikasi, pembelanjaraan dan pengembangan (Balasundaram et al., 2010). Pemberdayaan perempuan di Negeri Lima memerlukan perhatian dan strategi yang jelas hal ini dikarenakan menurut Marwati & Astuti (2012) kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab belum terciptanya kesetaraan dalam mengelola sumber daya.

## Kesimpulan

Kondisi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Kecil Di Negeri Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dilihat dari 3 indikator yaitu akses, indikator partisipasi, dan indikator manfaat. Pada indikator akses terbagi menjadi 2 yaitu akses produksi masih terkendala pada alat karena tergolong masih sederhana, belum adanya rumah produksi dan kurangnya pelatihan pemberdayaan di bidang ekonomi. Akses distribusi masih dalam lingkup Negeri Lima karena terkendala pada alat produksi yang belum memadai. Kemudian pada indikator partisipasi, di klasifikasikan menjadi 3 unsur yakni unsur *society* (kelompok perempuan), unsur pemerintah (*state*) yang terbagi menjadi Pemerintah Negeri, satker BB3KP, BPPP-Ambon, dan Dinas Kelautan Perikanan Kab. Maluku Tengah serta unsur NGO/LSM. Indikator manfaat yang didapat pada kelompok pemberdayaan ini di bagi menjadi 2, yaitu manfaat *direct* dan *indirect*. Manfaat *direct* meliputi peningkatan jumlah pelanggan dan peningkatan pendapatan. Manfaat *in direct* mencakup peningkatan kemampuan produksi, serta membuka peluang kelompok ini sebagai lapangan pekerjaan yang dapat mengakomodasi kebutuhan perempuan yang sebelumnya hanya berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Strategi pengembangan kelompok pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha kecil di Negeri Lima agar berkelanjutan yakni memperluas jangkauan penjualan produk hasil olahan, memperluas jangkauan pasar melalui media sosial, memperluas dan memperkuat jalinan kerja sama dengan berbagai macam *stakeholder*, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan menjadi variatif, meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi, produksi dan distribusi serta penciptaan iklim yang kondusif dalam mendorong aktifitas usaha perempuan.

## Daftar Pustaka

- Aini, D. N., Wahyunigtyas, N., & Kurniawan, B. (2021). Modal sosial pemberdayaan perempuan UMKM Batik Tulis Pinang Desa Capang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, *1*(12), 1344–1353. <https://doi.org/10.17977/um063v1i12p1344-1353>
- Balasundaram, N., Absar, M., & Akhter, S. (2010). Empowering Women through Entrepreneurship Development in Emerging Economies: An Overview. *International Conference on Knowledge Globalization(ICKG)*.

- Cai, M., Murtazashvili, I., & Murtazashvili, J. (2019). The politics of land property rights. *Journal of Institutional Economics*, 16, 1–17. <https://doi.org/10.1017/S1744137419000158>
- Dabissa, A. (2013). *Impacts of Joint Land Rights Titling on Women Empowerment: Evidence from Ethiopia*. Wageningen University.
- Elizabeth, R. (2016). Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25, 126. <https://doi.org/10.21082/fae.v25n2.2007.126-135>
- Ghimire, P., Devkota, N., Maraseni, T., Khanal, G., Deuja, J., & Khadka, U. (2024). Does joint land ownership empower rural women socio-economically? Evidence from Eastern Nepal. *Land Use Policy*, 138. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107052>
- Green, M. C., & Brock, T. C. (2005). *Persuasiveness of Narratives*. Sage Publications, Inc.
- Haryani, H., & Desmawati, L. (2021). Pemberdayaan Perempuan pada Kelompok Salma Batik di Dusun Malon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jendela PLS*, 5, 68–75. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2704>
- Kuntarta. (2020). Perencanaan Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(4), 439–446. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2020.006.03.13>
- Mahmudah, L., & Yasin, A. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 119–130. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p119-130>
- Mandal, K. C. (2013). Concept and Types of Women Empowerment. *International Forum of Teaching & Studies*, 9(2).
- Marthalina. (2018). Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 59–76.
- Marwati, S., & Astuti, I. D. (2012). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal SEPA*, 9(1), 134–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sepa.v9i1.48814>
- Purwaningsih, E. S., & Kusuma, P. F. (2021). Peran Perempuan dan Pengembangan Ekonomi Keluarga Melalui Pengembangan Umkm Produk Upcycle Selama Pandemi COVID 19. 455–466.
- Rahman, Md. S., Haque, M., Afrad, M. S. I., Hasan, S. S., & Rahman, M. (2023). Impact of mobile phone usage on empowerment of rural women entrepreneurs: Evidence from rural Bangladesh. *Heliyon*, 9, e21604. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21604>
- Ribot, J., & Peluso, N. (2003). A Theory of Access\*. *Rural Sociology*, 68, 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Safrida, S., Afrizal Tjoetra, Rachmatika Lestari, & Nila Safrida. (2022). Peran Stakeholder sebagai Aktor Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Perempuan "Sepakat" melalui Potensi Lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 416–433. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.122>
- Sahrakorpi, T., & Bandi, V. (2021). Empowerment or employment? Uncovering the paradoxes of social entrepreneurship for women via Husk Power Systems in rural North India. *Energy Research & Social Science*, 79, 102153. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102153>
- Suparjan, & Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Social Agency.
- Thaddeus, K., Bih, D., Nebong, N., Chi, A., Mongo, E., Akume, A., & Onwumere, J. (2022). Female labour force participation rate and economic growth in sub-Saharan Africa: "a liability or an asset." *Journal of Business and Socio-Economic Development*, ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JBSED-09-2021-0118>